

LAPORAN RISET

**PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
“BUNG HATTA ANTI CORRUPTION AWARD”**

**ANALISIS TUJUAN HUKUM PASAL 128A UNDANG-
UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**



Diajukan oleh :

Aurellavi Dyah Pramesti

NPM : 190513332

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

LAPORAN RISET

**PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
“BUNG HATTA ANTI CORRUPTION AWARD”**

**ANALISIS TUJUAN HUKUM PASAL 128A UNDANG-
UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**



Diajukan oleh :

Aurellavi Dyah Pramesti

NPM	: 190513332
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah disetujui untuk ujian riset pada tanggal 29 Desember 2022

Mitra Pembimbing

Dosen Pembimbing



Korneles Materay, S.H.



Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN RISET

PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA “BUNG HATTA ANTI CORRUPTION AWARD”

ANALISIS TUJUAN HUKUM PASAL 128A UNDANG- UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA



Laporan Riset ini telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 16 Januari 2023
Tempat : Zoom Cloud Meeting

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.
Sekretaris : Korneles Materay, S.H.
Anggota : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Ucap syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kesempatan dan kemampuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Analisis Tujuan Hukum Pasal 128A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara”. Penelitian dilakukan guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Terima kasih kepada para pihak yang telah turut serta membantu dan memberikan dukungan kepada penulis:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta seluruh jajaran Wakil Dekan.
2. Bapak Dr. C. Kastowo, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing riset yang telah membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam penulisan laporan riset ini.
3. Mas Korneles Materay, S.H., selaku mitra pembimbing riset dari Bung Hatta Anti-Corruption Award yang telah membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam penulisan laporan riset ini.
4. Bapak Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M., selaku narasumber dalam penelitian ini. Terima kasih atas bimbingan dan arahnya.
5. Dr. Haris Retno Susmiyati, S.H., M.H., selaku narasumber dalam penelitian ini. Terima kasih atas bimbingan dan arahnya.
6. Fajri Fadhillah, S.H., selaku narasumber dalam penelitian ini. Terima kasih atas bimbingan dan arahnya.

7. Bapak Reinardus Budi Prasetyo, S.H., M.H., selaku dosen yang telah membimbing, mengarahkan, dan mendampingi penulis dalam kegiatan riset MBKM.
8. Kedua orang tua, mba, dan mas.
9. Kepada teman dekat penulis, Rama Agung Nur Pratama. Terima kasih selalu menawarkan bantuan, memberikan makanan, dan menghibur penulis dalam carut-marut proses penelitian.
10. Kepada teman-teman seperjuangan riset, Anna, Milan, dan Yovita. Terima kasih sudah membagi semangat kalian, sehingga penulis mampu menyelesaikan laporan riset ini tepat waktu.
11. Kepada teman dekat penulis, Fitrihanur Haliza yang sudah mendengarkan curahan hati penulis dan selalu memberikan dukungan.
12. Kepada teman-teman Kelompok 7 KKN, Kak Ivan, Ayu, Sintia, Sara, Cece, Santi, Juwan, Remy, dan Amsal. Terima kasih telah mendukung penulis dalam menyelesaikan laporan riset ini selama di lokasi penerjunan KKN.

Gunungkidul, 27 Desember 2022

Penulis,



Aurellavi Dyah Pramesti

ABSTRAK

Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement dan berkomitmen untuk mewujudkan Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Penambahan Pasal 128A Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan inkonsistensi Indonesia dalam mencegah krisis iklim. Penelitian ini akan membahas apakah Pasal 128A mampu memberikan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat secara luas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil yang diperoleh adalah pengenaan royalti 0% belum dapat memberikan keadilan sosial bagi masyarakat karena masih terdapat ketidakadilan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pengenaan royalti 0% juga belum mampu memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Pasal 128A mengandung kepastian melalui hukum, namun tidak memenuhi aspek kepastian hukum itu sendiri karena belum memenuhi unsur pasti dan dibuat bertentangan dengan fakta, realitas atau kenyataan yang ada di Indonesia. Dengan demikian, Pasal 128A belum dapat memenuhi aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat secara luas.

Kata kunci: batubara, Pasal 128A, tujuan hukum.

ABSTRACT

Indonesia has ratified the Paris Agreement and is committed to achieving Net Zero Emissions by 2060 or sooner. The addition of Article 128A of Law no. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining is Indonesia's inconsistency in preventing the climate crisis. This research will discuss whether Article 128A can provide legal objectives, specifically justice, benefits, and legal certainty for society. The research method used is the normative legal research method. The result is the imposition of a 0% royalty has not been able to provide social justice for the community because there are still injustices in the economic, social, and environmental aspects. The imposition of a 0% royalty has also not been able to provide benefits to the community. Article 128A contains certainty through the law, but does not fulfill the aspect of legal certainty itself because it has not met the elements of certainty and is made contrary to realities in Indonesia. Thus, Article 128A has not been able to fulfill the aspects of justice, benefits, and legal certainty for the community at large.

Keywords: coal, Article 128A, legal objectives.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
KATA PENGANTAR	IV
ABSTRACT	VII
DAFTAR ISI	VIII
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	X
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	12
1. Pengertian Analisis	12
2. Tujuan Hukum	12
3. Pasal 128A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara	13
G. Metode Penelitian	14
1. Sumber Data.....	14
2. Cara Pengumpulan Data	16
3. Analisis Data	16
BAB II PEMBAHASAN	18
A. Tinjauan Umum Kondisi Batubara di Indonesia	18
B. Pengaturan PNT Batubara di Indonesia	20
C. Pengaturan Royalti Batubara di Indonesia	21
D. Latar Belakang Penambahan Pasal 128A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.....	22

E. Implikasi Penerapan Pasal 128A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	26
1. Aspek Ekonomi	26
2. Aspek Sosial.....	29
3. Aspek Lingkungan	31
F. Analisis Pemenuhan Tujuan Hukum Pasal 128A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	33
1. Pemenuhan Tujuan Hukum Aspek Keadilan	33
2. Pemenuhan Tujuan Hukum Aspek Kemanfaatan	40
3. Pemenuhan Tujuan Hukum Aspek Kepastian Hukum.....	47
BAB III PENUTUP.....	50
A. Simpulan.....	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	21
Tabel 2.....	26
Tabel 3.....	29

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa laporan riset ini bukanlah duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain, melainkan merupakan karya asli penulis. Apabila laporan riset ini terbukti menduplikasi karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi baik sanksi akademik maupun sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gunungkidul, 27 Desember 2022

Yang menyatakan,



Aurellavi Dyah Pramesti